

LAPORAN HASIL PENELITIAN

PERSEPSI MAHASISWA KOTA SEMARANG  
TERHADAP DEMOKRATISASI INDONESIA



Oleh:

Drs. Yuwanto, M.Si., Ph.D.  
NIDN: 0025036509

Dibiayai dari Sumber Dana DIPA FISIP UNDIP  
Tahun Anggaran 2014

Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro  
Semarang  
2014

## HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Persepsi Mahasiswa Kota Semarang Terhadap Demokratisasi Indonesia
2. Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3. Jurusan / Prodi : Ilmu Pemerintahan
4. Ketua Peneliti :
  - a. Nama Lengkap dan Gelar : Drs. Yuwanto, M.Si., Ph.D.
  - b. NIP/NIDN : 19650325 198803 1 001/0025036509
  - c. Jabatan Fungsional dan Golongan : Lektor Kepala/IVA
  - d. Fakultas/Jurusan : ISIP/Ilmu Pemerintahan
  - e. Alamat dan No. Telp. Kantor : Jl. Prof. H. Soedharto, S.H. Tembalang Semarang 50275 Tel. 7465407
  - f. Alamat dan No. Telp. Rumah : Jl. Jangli Krajan Barat IV/132 Semarang 50254 Tel. 8446808
5. Lokasi Penelitian : Kota Semarang
7. Lama Penelitian : 6 (enam) bulan
8. Biaya Yang Diperlukan : Rp 5.900.000,00 (*lima juta Sembilan ratus ribu rupiah*)
9. Sumber Dana : DIPA FISIP UNDIP Tahun Anggaran 2014

Semarang, 17 November 2014



Ketua Peneliti,

Drs. Yuwanto, M.Si., Ph.D.  
NIP.19650325 198803 1 001

Menyetujui,  
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
Universitas Diponegoro

Prof. Dr. Ocky Karna Radjasa, M.Sc.  
NIP. 19651029 199003 1 001

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Yuwanto, M.Si., Ph.D.  
NIP/NIDN : 19650325 198803 1 001/0025036509  
Pangkat/Gol : Pembina/IVa  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
Jurusan/Fakultas : ISIP/Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa laporan penelitian yang kami susun dengan judul:

**“Persepsi Mahasiswa Kota Semarang Terhadap Demokratisasi Indonesia”**

Adalah benar-benar hasil karya kami sendiri dan bukan merupakan plagiat dari penelitian atau karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari pernyataan kami tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan bilamana diperlukan.

Semarang, 17 November 2014

Pembuat Pernyataan,

METERAI  
TEMPEL

PAJAK HEMBAUNGAN BANGSA  
TGL

9149BAA643480352

ENAM RIBU RUPAH

6000

DJP

Drs. Yuwanto, M.Si., Ph.D.

NIP.19650325 198803 1 001

## ABSTRACT

In materializing the whole system of democratic government, Indonesia has undertaken the process of democratization (the transition, consolidation, and maturing of citizen's political culture). Students were perceived as one of strategic elites along the democratization processes in this country. As political reformation movement goes by, however, the role of students in democratization is questioned very often. This research deals with the Semarang Municipal students' perception toward democratization in Indonesia.

Therefore the aim of this study was to describe the perceptions of Semarang Municipal students toward democratization in Indonesia. The analysis showed that the democratic system is in conformity with the system of government in Indonesia. The students as a part of citizens confidence that the ongoing democratization in Indonesia has done well but not convinced that democratization in Indonesia (with the implementation of the transition and consolidation) have been able to improve the socio-economic conditions of society and makes government of Indonesia to be better.

Recommendations from this study as follows: (i) Government should provides early political education on the all subjects of democratic political system, providing open space for society, more transparent and accountable in the implementation of governance (ii) Citizens should accepts democracy as "the only game in town" and more caring and actively participate in the political system (iii) Students should improves and maintains the fighting spirit in defending the fate of nations, revive its role as an agent of change.

*Keywords:* Democratization, perception, democratic political system.

## KATA PENGANTAR

Fuji syukur kepada Tuhan Yang Mahaesa untuk selesainya penelitian dan penulisan laporan penelitian ini. Penelitian ini didasari keinginan untuk mengetahui dan memahami persepsi mahasiswa Kota Semarang terhadap demokratisasi di Indonesia.

Setelah lebih dari satu setengah dasawarsa reformasi politik terjadi dan berlangsung, telah tercapai banyak perubahan mendasar dan kemajuan pesat dalam tata nilai dan tata kelola pemerintahan di Indonesia; termasuk perubahan kelembagaan utama dan terbentuknya kelembagaan tambahan (*auxiliary state organs*). Namun dalam kenyataan, pada level masyarakat belum terbentuk secara penuh kultur politik demokrasi yang menopang beroperasinya berbagai kelembagaan tersebut sehingga terkesan ada kesenjangan antara kelembagaan demokrasi dan kultur warga negaranya.

Penelitian terhadap mahasiswa sebagai bagian warga negara yang terdidik dan memiliki peran unik dalam sejarah perkembangan bangsa dipandang sangat penting dan mendesak. Kiranya hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan yang bermakna bagi perkembangan demokratisasi di Indonesia.

Peneliti,

Drs. Yuwanto, M.Si., Ph.D.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
ABSTRAKSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	v
 BAB I     PENDAHULUAN	
1.1.     Latar Belakang Masalah .....	1
1.2.     Rumusan Masalah .....	7
1.3.     Tujuan Penelitian .....	7
1.4.     Kontribusi Penelitian .....	8
1.5.     Luaran Penelitian .....	8
1.6.     Tinjauan Pustaka .....	8
1.7.     Operasionalisasi Konsep .....	25
1.8.     Metode Penelitian .....	26
 BAB II     DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN	
2.1.     Visi Misi Kota Semarang .....	29
2.2.     Keadaan Demografi .....	33
2.3.     Keadaan Sosial Ekonomi .....	35
 BAB III    MAHASISWA DAN DEMOKRATISASI	
3.1.     Identitas Responden .....	37
3.2.     Persepsi Mahasiswa Terhadap Demokratisasi di Indonesia ....	39
3.2.1. Orientasi Kognitif Mahasiswa .....	39

3.2.2. Orientasi Afektif Mahasiswa .....	50
3.2.3. Orientasi Evaluatif Mahasiswa .....	60
 BAB IV    PENUTUP	
4.1.    Kesimpulan.....	62
4.2.    Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Jumlah Penduduk Kota Semarang .....	33
Tabel 2.2. Perkembangan Penduduk .....	34
Tabel 3.1. Deskripsi Responden Menurut PIN.....	37
Tabel 3.2. Deskripsi Responden Menurut Angkatan.....	38
Tabel 3.3. Deskripsi Responden Menurut Jenis Kelamin.....	38
Tabel 3.4. Deskripsi Responden Menurut Pengetahuan tentang Sistem Demokrasi.....	39
Tabel 3.5. Deskripsi Responden Menurut Pengetahuan tentang Akuntabilitas Sistem Demokrasi .....	40
Tabel 3.6. Deskripsi Responden Menurut Pengetahuan tentang Suksesi Kekuasaan dalam Demokrasi.....	41
Tabel 3.7. Deskripsi Responden Menurut Pengetahuan tentang Rekrutmen Politik yang Terbuka dalam Sistem Demokrasi.....	43
Tabel 3.8. Deskripsi Responden Menurut Pengetahuan tentang Pemilu.....	44
Tabel 3.9. Deskripsi Responden Menurut Pengetahuan tentang HAM.....	45
Tabel 3.10. Deskripsi Responden Menurut Pengetahuan tentang Masa Transisi Demokrasi di Indonesia.....	46
Tabel 3.11. Deskripsi Responden Menurut Pengetahuan tentang Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia .....	47
Tabel 3.12. Demokrasi Responden tentang konsolidasi Demokrasi.....	48
Tabel 3.13. Deskripsi Responden tentang Budaya Politik.....	49
Tabel 3.14. Sumber Pengetahuan Responden tentang Demokratisasi.....	49
Tabel 3.15. Deskripsi Responden tentang keyakinan Terhadap Kesesuaian Sistem Demokrasi dan Pelaksanaan Pemerintahan.....	51
Tabel 3.16. Deskripsi Responden Menurut Keyakinan bahwa Pemerintah Indonesia Sudah Akuntabel.....	52
Tabel 3.17. Deskripsi Responden Menurut Keyakinan Terhadap Suksesi Kekuasaan di Indonesia.....	53



Tabel 3.18. Deskripsi Responden menurut Keyakinan terhadap Keterbukaan Kekrutmen Politik.....	54
Tabel 3.19. Deskripsi Responden Menurut Keyakinan Terhadap Kejujuran dan Keadilan Pelaksanaan Pemilu.....	55
Tabel 3.20. Deskripsi Responden Menurut Perasaan terhadap Adanya Perlindungan HAM dan Kebebasan Pers di Indonesia.....	56
Tabel 3.21. Deskripsi Responden Menurut Keyakinan terhadap Demokratisasi Dalam Tatakelola Pemerintahan.....	57
Tabel 3.22. Deskripsi Responden tentang Kaitan Budaya Politik dan Sistem Pemerintahan yang Demokratis di Indonesia.....	58
Tabel 3.23. Deskripsi Responden Menurut Keyakinan tentang Kesesuaian Harapan terhadap Demokratisasi di Indonesia .....	59
Tabel 3.24. Deskripsi Responden Menurut Evaluasi terhadap Demokratisasi di Indonesia.....	60

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Sejak tahun 1998 Indonesia masuk babak baru demokratisasi dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara; baik tata kelembagaan, tata kelola pemerintahan dan hubungan kekuasaan pusat-daerah, maupun hubungan negara dan masyarakat. Sebagai suatu sistem, demokrasi memiliki unsur-unsur yang mendukung eksistensi dan perkembangannya, seperti negara hukum, masyarakat madani, infrastruktur politik (partai politik dan kelompok kepentingan), serta pers yang bebas dan bertanggung jawab.<sup>1</sup> Sedangkan prinsip pemerintahan yang demokratis adalah adanya pemisahan kekuasaan (*separation of power*), supremasi hukum atau pemerintahan berdasarkan hukum (*law supremacy* atau *rule of law*), serta kesederajatan (*equality*) dan kebebasan (*liberty*).<sup>2</sup> Prinsip tersebut dilakukan agar tidak terjadinya tindak penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh setiap institusi maupun individu, selain itu juga agar dapat memberikan kebebasan dan keadilan secara merata dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.

Demokratisasi di Indonesia ditandai oleh proses transisi dari rezim orde baru menuju orde reformasi. Pergantian masa tersebut diakibatkan oleh penolakan masyarakat terhadap pemerintahan Soeharto yang otoriter dan terjadinya stagnasi atau kegagalan ekonomi yang memperburuk keadaan perekonomian rakyat

---

<sup>1</sup> *Demokrasi Indonesia*. Dalam [www.courseware.politekniktikom.ac.id](http://www.courseware.politekniktikom.ac.id) diunduh pada tanggal 4 Mei 2014 pada pukul 16.25 WIB

<sup>2</sup> Muhadam Labolo, dkk. (2008). *Beberapa Pandangan Dasar Tentang Ilmu Pemerintahan*. Malang: Bayumedia Publishing. hlm. 530.

sehingga mengakibatkan tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia.

Demokratisasi di Indonesia dalam perkembangannya didukung oleh upaya amandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali dalam kurun waktu 3 tahun (1999-2002), sehingga menjadi dasar bagi penataan kelembagaan demokrasi (*democratic-institutional arrangement*) pada cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif, serta pelaksanaan pemilihan umum yang telah berlangsung sebanyak 4 kali (1999, 2004, 2009, 2014).

Setelah masa reformasi 1998, Indonesia telah melaksanakan demokrasi terbuka, otonomi daerah, dan kebebasan pers<sup>3</sup>, namun ternyata masih belum dapat memperbaiki kondisi masyarakat secara keseluruhan yang dikarenakan belum tercapainya tujuan demokrasi. Otonomi daerah yang dianggap dapat membantu pemerintah pusat untuk dapat mengatur rumah tangga di setiap daerah, ternyata memberikan permasalahan baru dimana terbentuknya penguasa-penguasa baru di daerah yang mengakibatkan ketidakstabilan antara demokrasi dan politik nasional. Belum tercapainya tujuan demokrasi sebenarnya dikarenakan masih adanya kendala yang dihadapi oleh pemerintah. Walaupun pemerintah telah melakukan konsolidasi terhadap lembaga-lembaga, struktur maupun sistem politik di Indonesia, namun pemerintah masih belum dapat melakukan konsolidasi terhadap kultur atau budaya politik di Indonesia. Budaya politik itu sendiri menurut Almond & Verba adalah sikap-sikap individu terhadap peran mereka sendiri di dalam sistem politik, sehingga bagaimana pemerintah mensosialisasikan sistem

---

<sup>3</sup> Azyumardi Azra, dalam [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id) diunduh tanggal 16 Mei 2014 pada pukul 17.35 WIB

yang demokratis terhadap masyarakat sehingga masyarakat mengerti akan peran mereka terhadap sistem politik dan ikut berpartisipasi secara aktif di dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Pemerintahan yang demokrasi membutuhkan kultur demokrasi untuk membuatnya *performed* (eksis dan tegak). Sebuah pemerintahan yang baik dapat tumbuh dan stabil bila masyarakat pada umumnya punya sikap positif dan proaktif terhadap norma-norma dasar demokrasi. Karena itu harus ada keyakinan yang luas di masyarakat bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang terbaik dibanding dengan sistem lainnya (Saiful Mujani, 2002). Untuk itu masyarakat harus menjadikan demokrasi sebagai *way of life* yang menuntun tata kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, pemerintahan, dan kenegaraan<sup>4</sup>. Sehingga dengan demikian masyarakat tidak lagi hanya sebagai objek yang berperan pasif dan tidak memiliki peran penting, namun bisa menjadi aktor politik yang dapat berperan aktif di dalam menciptakan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Demokrasi tidak lagi hanya sekedar sebagai alat untuk dapat melaksanakan sistem pemerintahan namun sekaligus juga menjadi suatu tujuan untuk dapat menciptakan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kendala yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam melakukan konsolidasi terhadap budaya politik di Indonesia diakibatkan oleh menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat diakibatkan oleh kurang efektifnya kinerja pemerintah

---

<sup>4</sup>Demokrasi Indonesia. *op.cit.*

baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menentukan dan melaksanakan keputusan kebijakan publik, pemberian pelayanan publik, serta dalam upaya penegakan hukum. Selain akibat dari ketidak efektifan kinerja pemerintah, penurunan kepercayaan masyarakat juga diakibatkan oleh semakin meningkatnya kasus Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di Indonesia.

Kinerja pemerintah yang belum efektif serta meningkatnya kasus KKN akan mengakibatkan kesulitan bagi bangsa Indonesia dalam mengharapkan terjadinya pembangunan bangsa yang efektif dan bahkan sulit juga mengharapkan terwujudnya cita-cita bangsa untuk dapat mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Oleh sebab itu, pemerintah harus dapat bekerja keras untuk dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang telah lama memudar. Apabila pemerintah tidak dapat menanggulangi permasalahan tersebut maka pemerintah juga tidak dapat meningkatkan budaya politik di Indonesia yang akan mengakibatkan tidak dapat berjalannya pemerintahan yang demokrasi. Karena pemerintahan yang demokrasi menuntut adanya partisipasi masyarakat (yang merupakan aktor politik) terhadap pelaksanaan sistem pemerintahan.

Upaya membangun budaya politik yang demokrasi memang jauh lebih sulit dibandingkan dengan membangun struktur demokrasi. Hal ini menyangkut kebiasaan masyarakat yang membutuhkan waktu yang relatif lama untuk merubahnya. Bayangkan, Indonesia yang secara struktur telah merepresentasikan sebagai negara demokrasi, namun masih banyak peristiwa-peristiwa yang

menggambarkan kebebasan yang semakin liar; kekerasan, bentrokan fisik, konflik antar etnis/ras dan agama, ancaman bom, teror, rasa tidak aman, dan sebagainya<sup>5</sup>.

Bahkan mengatasnamakan demokrasi, sebagian orang menyalurkan aspirasinya dengan melakukan demonstrasi atau demo. Demo telah menjadi senjata ampuh, terinspirasi dari kekuatan demo yang dapat melengserkan kekuasaan Orde Baru. Sejak era reformasi kegiatan demonstrasi mudah didapat di banyak tempat, paling tidak dari tayangan televisi hampir tiap hari tersaji. Karena seringnya kegiatan demo yang kadang sekedar atau asal demo agar memperoleh pemberitaan di media, maka timbul istilah *plesetan* kata demokrasi menjadi “demo-crazy”. Demokrasi sangat dekat dengan kebebasan yang amat luar biasa, sebagian ada yang dilakukan dengan cara demo yang mendekati cara-cara yang “crazy”. Peristiwa terbunuhnya ketua DPRD Sumatra Barat oleh para demonstran menjadi salah satu tragedi dari kebebasan berdemokrasi, yang dilaksanakan bukan saja secara “crazy”, melainkan sudah masuk kategori biadab<sup>6</sup>.

Hingga saat ini, yaitu 16 tahun setelah masa reformasi, demokrasi ternyata masih belum dapat terwujud dengan seutuhnya. Seperti yang telah dipaparkan di atas, terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam melakukan konsolidasi terhadap sistem, lembaga-lembaga dan budaya, sehingga hal yang terlebih dahulu dapat dilakukan oleh pemerintah adalah membangun kembali kepercayaan masyarakat. Karena penyebab utama menurunnya partisipasi masyarakat adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Sutejo. *Demokrasi: antara harapan dan Kenyataan*. Diunduh pada tanggal 4 Mei 2014 pada pukul 16.25 WIB.

yang tidak akuntabel dan transparan sehingga dianggap tidak mampu memecahkan masalah sosial dan ekonomi yang terjadi.

Demokrasi yang dianggap sebuah sistem pemerintahan yang paling baik untuk Indonesia, karena memberikan kedaulatan sepenuhnya kepada rakyat, ternyata tidak dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. Ketidakpuasan masyarakat terhadap demokratisasi di Indonesia yang mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dianggap perlu untuk dikaji, karena masyarakat merupakan aktor utama dalam sistem pemerintahan yang demokratis, sehingga perlu diketahuinya persepsi dari masyarakat itu sendiri.

Persepsi itu sendiri adalah hasil interaksi yang berupa pemahaman, pengertian dan pengenalan tentang objek tertentu terhadap apa yang diamati, diketahui, dialami maupun yang dirasakan. Baik Davidoff maupun Bimo Walgito menjelaskan bahwa persepsi merupakan proses *intergrated* yaitu keseluruhan hal yang ada dalam individu seperti perasaan, pengalaman, kemampuan berpikir, kerangka acuan dan aspek-aspek lainnya.<sup>7</sup> Sehingga persepsi masyarakat terhadap demokratisasi yang berlangsung di Indonesia adalah pemahaman masyarakat yang disertai dengan ikatan emosional mereka terhadap proses demokrasi yang berlangsung di Indonesia, sehingga masyarakat dapat memberikan penilaian mereka terhadap pelaksanaan sistem politik di Indonesia. Apabila masyarakat merupakan suatu komunitas terbesar di dalam suatu negara, maka salah satu bagian dari komunitas tersebut adalah mahasiswa.

---

<sup>7</sup> Siswati. *Persepsi Mahasiswa Terhadap Pemilu 1999*. Dalam [www.journal.unair.ac.id/pdf](http://www.journal.unair.ac.id/pdf) diunduh pada tanggal 4 Mei 2014 pada pukul 16.25 WIB.

Mahasiswa yang merupakan bagian dari bangsa Indonesia memiliki peranan penting dalam mengaspirasikan suara rakyat kepada pemerintah. Mahasiswa yang bisa dikategorikan sebagai cendekiawan, harus mampu memahami suatu obyek secara obyektif, kritis, tidak terikat oleh golongan atau kelompok tertentu, harus dapat membedakan yang baik dan buruk, benar atau salah sesuai dengan ilmunya. Selain itu cendekiawan mempunyai tanggung jawab moral terhadap lingkungannya.<sup>8</sup> Sehingga mahasiswa Indonesia harus dapat memahami lebih kritis terhadap proses demokrasi atau demokratisasi di Indonesia dengan tidak memiliki keterikatan terhadap ideologi suatu golongan maupun kelompok tertentu, karena mahasiswa merupakan bagian kaum yang intelektual.

### 1.2. Rumusan Masalah

Pertanyaan penelitian utama tentang bagaimana persepsi mahasiswa Kota Semarang terhadap demokratisasi Indonesia akan dijawab melalui sejumlah subpertanyaan, seperti: bagaimana tingkat pengetahuan (*cognitive*), tingkat keterlibatan emosional (*affective*), dan tingkat kemampuan menilai (*evaluative*) di kalangan mahasiswa Kota Semarang terhadap demokratisasi Indonesia?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan deskripsi tentang persepsi mahasiswa Kota Semarang terhadap berbagai aspek demokratisasi Indonesia.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*



#### 1.4. Kontribusi Penelitian

Secara akademis, hasil penelitian berguna bagi pengayaan (*enrichment*) kajian demokratisasi, terutama persepsi kalangan muda terdidik terhadap efektivitas demokrasi di negara berkembang.

Secara praktis, hasil penelitian berguna bagi para pembuat keputusan (*decision-makers*) untuk merumuskan berbagai kebijakan yang mampu mengarahkan warga negara kepada penguatan nilai dan kultur yang prodemokrasi.

#### 1.5. Luaran Penelitian

Penelitian akan menghasilkan publikasi ilmiah dalam bentuk jurnal ilmiah nasional.

#### 1.6. Tinjauan Pustaka

##### **Persepsi**

Persepsi adalah inti dari komunikasi. Sedangkan penafsiran (*interpretasi*) adalah inti persepsi yang identik dengan penyandian-balik (*decoding*) dalam proses komunikasi. Hal ini jelas tampak menurut Cohen dalam Mulyana (2001) bahwa persepsi didefinisikan sebagai interpretasi bermakna atas sensasi sebagai representatif objek eksternal serta pengetahuan yang tampak mengenai apa yang ada di luar sana. Ahli komunikasi lain (de Vito, 1997) mendefinisikan persepsi sebagai proses dengan mana seseorang menjadi sadar akan banyaknya stimulus yang mempengaruhi indranya. Persepsi mempengaruhi rangsangan (stimulus) atau